



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR
PAPUA TENGAH NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN
PERANGKAT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada tanggal 17 Juli 2024, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 113 Tahun 2024 tentang Perangkat Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...../3

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Agustus 2024.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN
II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

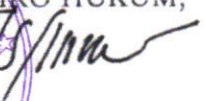
SUSUNAN KEANGGOTAAN PERANGKAT

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
I.	TIM PEMBINA DAN PENGAWAS	
	1. Gubernur Papua Tengah.	Pelindung Pembina
	2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.	
	3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah
	4. Inspektur Provinsi Papua Tengah.	Pengawas
II.	TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	1. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah.	Kepala UKPBJ Provinsi Papua Tengah
	2. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Koordinator Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
	3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	4. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	6. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE
	7. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	8. Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
	9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota

	10. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah 11. Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 12. Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 13. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Layananan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Anggota Anggota Anggota
III.	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Alpius Muyapa, S.IP. 2. Aloysius Irto Parintak, S.T 3. Annies Liando, S.E.,M.M. 4. Dwi Yanto, S.ST. 5. Henry Reynold Mangge, S.T.,M.Si. 6. Imam Budi Santoso, S.T. 7. Irianto, S.Pt. 8. Jerry Paryantho Muyapa, S.Hut. 9. Jusnelli, S.Kep.Ns 10. Kornelius Tumanan, S.E.,M.M. 11. Nian Rauf, SKM.,M.Kes. 12. Nurul Farida 13. Oktavianus Tallulembang, S.P. 14. Paulina Hamadi, S.Si.,A.Pt. 15. Roni Awaluddin Togala, S.E. 16. Rynoanto Salebu, S.T. 17. Salmon A. Manuaron, S.T. 18. Wepter Tampubolon, S.T. 19. Wisnu Wirabuana, S.T. 20. Yenni Selina Wambukomo, S.T.	Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja
IV.	PENDAMPING HUKUM 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah 2. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum	Pendamping Hukum Pendamping Hukum
V.	STAF TEKNIS/PELAKSANA: 1. Alex Albert Willem Sikoway,S.Sos. 2. Eko Budiyanto, S.E 3. Nurbani Arifin, S.IP	Trainer Verifikator Helpdesk

VI.	STAF PENDUKUNG: 1. Melika Keiya, S.Sos 2. Ade Indah Cahyani 3. Demianus Kayame 4. Ferdinand Degei 5. Fredy Kadepe 6. Lenora Paula 7. Nur Hidayat Kahar 8. Nuraini 9. Muhammad Farhanasrul 10. Orison Tebai 11. Sapturia 12. Valentino Pigome	Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi Penatausahaan Administrasi
-----	--	--

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

RATUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP.197606082002121002

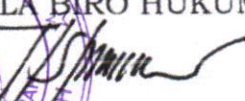


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN
II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 113 TAHUN 2024 TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

TUNJANGAN PROFESI PERANGKAT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	JABATAN	TUNJANGAN PROFESI PER BULAN (Rp)
1	2	3
	A. TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENGADAAN BARANG /JASA	
1.	Pelindung	10.000.000,00
2.	Pembina	5.000.000,00
3.	Pengarah	5.000.000,00
4.	Pengawas	5.000.000,00
	B. TIM PENGADAAN BARANG/JASA	
5.	Kepala UKPBJ selaku Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa	22.000.000,00
6.	Koordinator Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	12.000.000,00
7.	Anggota UKPBJ Provinsi Papua Tengah	5.000.000,00
8.	Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE	12.000.000,00
9.	Anggota Unit Kerja Pengelolaan LPSE	5.000.000,00
10.	Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	12.000.000,00
11.	Anggota Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	5.000.000,00
12.	Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL)	20.000.000,00
13.	Pendampingan Hukum	5.000.000,00
14.	Staf Teknis	4.510.000,00
15.	Staf Pendukung	3.260.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

